

Pengaruh Korupsi, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2004-2023

Gea Anisa Kusuma Ananda¹, Dimas Pratomo², Mia Selvina³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: geaans123@gmail.com

Article History:

Received: 01 Januari 2025

Revised: 15 Januari 2025

Accepted: 17 Januari 2025

Keywords: *Corruption, Open Unemployment Rate, Demographic Bonus, Economic Growth*

Abstract: *Economic growth is the process of increasing the economic welfare of a country within a certain period of time. Therefore, economic growth is important in assessing the success of a country in achieving its economic development. This study aims to analyze the effect of corruption, open unemployment rate and demographic bonus on economic growth in Indonesia in the short and long term. This research uses a quantitative type with a Vector Error Correction Model model. The type of data collected is secondary data sourced from the Transparency International website and the Central Bureau of Statistics. The results of the discussion of this study indicate that in the short term corruption and demographic bonus affect economic growth while the open unemployment rate has no effect on economic growth. In the long run corruption, open unemployment rate and demographic bonus affect economic growth.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam mencapai pembangunan ekonominya. Semakin cepat pertumbuhannya, semakin baik kinerja pemerintah dan lembaga terkait dalam mengelola perekonomian. Dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan di saat jumlah penduduk usia kerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk usia kerja tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, walaupun distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran di Indonesia didominasi oleh konsumsi rumah tangga (Kurniawati & Sugiyanto, 2021). Penurunan pertumbuhan dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti menurunnya kualitas pendidikan, penurunan tingkat kesehatan, atau berkurangnya akses terhadap sumber daya penting. Ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kemiskinan yang meluas juga dapat menjadi faktor penghambat pertumbuhan sosial (Alfada, 2019).

Dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumberdaya yang melimpah Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di asia. Namun faktanya Indonesia dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya namun termasuk negara yang miskin. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas

tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya (Irawan, 2023). Lemahnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran di kalangan pejabat negara telah menyebabkan korupsi menjadi penyakit sosial yang sulit disembuhkan. Korupsi rasanya sudah mendarah daging di pemerintahan Indonesia (Ardiansyah, 2019). Korupsi memiliki dampak yang sangat luas dan merusak. Di sektor politik, korupsi melemahkan demokrasi dan menggerogoti legitimasi institusi negara. Di bidang ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, mendistorsi persaingan pasar, dan menghambat investasi (Triatmanto, 2023). Selain itu, korupsi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pada tingkat sosial, korupsi menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi penegakan hak asasi manusia. Ringkasnya, korupsi menghasilkan ancaman yang kompleks, ada dimana-mana, dan mempunyai banyak aspek terhadap kepentingan bersama seluruh masyarakat yang memungkinkan terjadinya risiko sistemik yang sangat besar di berbagai sektor, mulai dari tingkat lokal hingga global (Luna-Pla & Nicolás-Carlock, 2020). Banyak undang-undang dan peraturan yang di ciptakan negara dengan tujuan untuk memberantas korupsi. Namun kenyataannya, tindak pidana korupsi di Indonesia terus berulang dan semakin rumit. Hal ini tercermin dari rendahnya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia.

Tabel 1. Data Indeks Persepsi Korupsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Bonus Demografi Dan Pertumbuhan Ekonomi

TAHUN	IPK	TPT (%)	BD (%)	PE (%)
2004	34	9.89	53.7	5.13
2005	22	11.24	53	5.6
2006	24	10.28	52.8	6.1
2007	23	9.11	52.5	6.9
2008	26	8.39	51.9	6.5
2009	28	7.87	51.4	4.9
2010	28	7.14	50.5	6.45
2011	30	7.48	50.1	6.17
2012	32	6.13	49.8	6.03
2013	32	6.17	49.5	5.56
2014	34	5.94	49.1	5.01
2015	36	6.18	48.6	4.88
2016	37	5.61	48.5	5.03
2017	37	5.5	48.2	5.07
2018	38	5.3	47.9	5.17
2019	40	5.23	47.9	5.02
2020	37	7.07	47.7	2.06
2021	38	6.49	47.6	3.7
2022	34	5.86	47.3	5.31
2023	34	5.32	47.2	5.05

Sumber : Transpacy International, Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1 menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih tinggi. Hal ini tercermin dari data indeks persepsi korupsi yang masih rendah. Sebagai negara yang memiliki angka korupsi yang tinggi, Indonesia mengalami masalah lain yaitu tingginya tingkat pengangguran. Besarnya angka pengangguran terbuka menunjukkan kondisi bahwa lapangan kerja yang ada terbatas dan juga mengindikasikan kapasitas yang dimiliki oleh

para pencari kerja relatif rendah.(Imanto et al., 2020) Pengangguran yang tinggi dapat menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dampak dari tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan banyaknya sumber daya sia-sia dan pendapatan masyarakat dapat berkurang. Jumlah pengangguran di Indonesia pun tergolong masih tinggi (Lidyawati & Murtala, 2020).

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2023 mengalami fluktuasi cenderung menurun namun angka tersebut masih tergolong tinggi. Angka pengangguran tertinggi berada di tahun 2005 yaitu sebesar 11,24% sedangkan angka terendah berada di tahun 2019 yaitu 5,25. Masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi rendahnya konsumsi.(Rahmalia, 2019) Menurut Keynes, penurunan upah tidak akan menyelesaikan masalah pengangguran. Ketika upah turun, daya beli masyarakat menurun, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi produksi dan memPHK pekerja (Winarni, 2022).

Dari sisi lain bonus demografi juga memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada saat ini Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi, suatu periode di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan proporsi penduduk di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun (Long et al., 2024). Dari data yang terpapar pada tabel 1 dapat diketahui bahwa Bonus Demografi di Indonesia menunjukkan perubahan secara dinamis. Jumlah bonus demografi trus mengalami peningkatan dalam 20 tahun terakhir. Hal ini terlihat dari data *dependency ratio* yang terus menurun dengan angka terendah 47.2, menurunnya *dependency ratio* disuatu negara dapat menjadi tolak ukur terjadinya bonus demografi, dimana rasio usia produktif di suatu negara tersebut meningkat. Dengan begitu peningkatan jumlah penduduk produktif dapat menjadi peluang emas bagi suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Bastianeli, 2024).

Terdapat penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup beragam. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Hazmi (2024) dan Darwin Damanik (2023), menunjukkan korelasi negatif antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Irawan (2023) justru tidak menemukan hubungan yang signifikan.

Mengenai pengaruh tingkat pengangguran terbuka, sebagian besar penelitian menunjukkan korelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat juga penelitian yang menemukan pengaruh positif atau tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan faktor lain yang memengaruhi.

Terkait dengan bonus demografi, hasil penelitian juga menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Huda (2021) tidak menemukan hubungan yang signifikan. Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Lestari (2024) dan Wardani (2024), menunjukkan bahwa bonus demografi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi ekonomi pada penduduk usia muda yang belum memiliki penghasilan tetap. Hal ini menghambat peningkatan pendapatan per kapita, mengingat identitas konsumen yang dominan pada kelompok usia tersebut. Akibatnya, produktivitas dan output ekonomi mengalami stagnasi, yang berimbas pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang melambat.

Berdasarkan paparan fakta dan gap penelitian di atas inilah yang menjadi alasan kuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam atas fenomena Pengaruh Korupsi, Tingkat

Pengangguran Terbuka Dan Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan wilayah penelitian yakni negara Indonesia (Nasional), dikaji dalam bentuk data time series dari tahun 2004-2023.

LANDASAN TEORI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka panjang, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keynes berpendapat bahwa aktivitas ekonomi suatu negara di dorong oleh permintaan agregat atau melalui persamaan $Y = C + I + G + (X - M)$. Model ini menjelaskan terjadinya kenaikan pada (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor neto (X-M) akan menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan pada PDB (Produk Domestik Bruto). Peningkatan PDB menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Sebaliknya jika terjadi penurunan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto akan menyebabkan penurunan pada produksi barang dan jasa. Menurunnya jumlah produksi barang dan jasa mengakibatkan menurunnya PDB. Hal ini menyebabkan pada penurunan pada pertumbuhan ekonomi.(Yossinomita, 2024)

b. Korupsi

Korupsi disuatu negara dapat diukur melalui indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi merupakan survei tahunan yang dikeluarkan oleh *Transparency International* untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap korupsi di sektor publik. Pengukuran IPK menggunakan skala 0-100 dimana semakin mendekati angka 0 menunjukkan korupsi yang tinggi dinegara tersebut dan semakin menjauhi angka 0 dan mendekati angka 100 maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi.(Transparency International, 2023) Banyaknya korupsi mengakibatkan penurunan investasi karena investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi. selain itu korupsi dapat menyebabkan penurunan efisiensi pada pengeluaran pemerintah karena menyebabkan alokasi dana yang tidak tepat sasaran, dimana dana yang seharusnya digunakan untuk program dan proyek publik sering diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu korupsi meningkatkan biaya tambahan melaui suap atau mark-up harga yang mengakibatkan anggaran yang dikeluarkan lebih tinggi dari yang seharusnya.(Arifin, 2024) Hal tersebut akan menurunkan produksi barang dan jasa yang pada gilirannya menurunkan pertumbuhan ekonomi.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Badan pusat statistik mengungkapkan pengangguran terbuka merupakan merupakan tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini bisa terjadi karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal atau karena malas bekerja dan enggan bekerja. Tingkat pengangguran terbuka dapat di hitung melalui rumus $(\text{jumlah pengangguran} / \text{jumlah angkatan kerja}) \times 100$. Menurut Keynes, masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan hanya disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini dapat dilimpahkan pada mekanisme pasar bebas. Menurut Keynes, penurunan upah tidak akan menyelesaikan masalah pengangguran. Ketika upah turun, daya beli masyarakat menurun, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi produksi dan memPHK pekerja.(Winarni, 2022) Pengangguran yang tinggi mengakibatkan menurunnya daya beli

masyarakat karena individu yang tidak memiliki pekerjaan tidak memiliki pendapatan untuk konsumsi. Hal ini berdampak pada permintaan agregat yang lebih rendah, yang dapat mengurangi kegiatan ekonomi. Pengangguran yang tinggi juga dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi, mengurangi kepercayaan investor sehingga menurunkan investasi dalam perekonomian. Yang pada akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. (Malik, 2022)

d. Bonus Demografi

Bonus Demografi merupakan kondisi saat penambahan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang membawa keuntungan bagi perekonomian suatu wilayah. Bonus demografi dapat diukur menggunakan *dependency ratio*. *Dependency ratio* merupakan perbandingan usia non produktif dengan penduduk usia produktif, *dependency ratio* dapat dihitung dengan rumus $100 \times (\text{penduduk (0-14)} + \text{penduduk usia (65+)}) / \text{penduduk usia (15-65)}$. Semakin tinggi *dependency ratio*, maka semakin berat beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk tidak produktif. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022) Frank W. Notestein mengatakan terjadinya bonus demografi diakibatkan oleh perubahan angka kematian dan kelahiran yang mengubah pertumbuhan penduduk yang semula tinggi menjadi rendah sehingga pertumbuhan penduduk menjadi stabil. Peningkatan penduduk usia produktif dapat mendorong produktivitas nasional karena lebih banyak individu yang berkontribusi dalam produksi barang dan jasa. Selain itu penduduk usia produktif memiliki daya beli yang lebih tinggi, sehingga konsumsi masyarakat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini juga dapat mendorong investasi karena penduduk usia kerja memiliki kemampuan untuk menabung dan berinvestasi, sehingga meningkatkan investasi domestik. Dengan meningkatnya pendapatan penduduk usia produktif akan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga pemerintah memiliki sumber dana untuk membiayai proyek infrastruktur. Selain itu penduduk usia produktif yang terdidik dan terampil mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Agus Yulistiyono, 2021)

e. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, kajian teori dan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan beberapa hipotesis penelitian yang diajukan, antara lain sebagai berikut.

- a. H1: Korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- b. H2: Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- c. H3: Bonus Demografi berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang disajikan dalam bentuk data *time series* selama 20 tahun yaitu tahun 2004-2022. Data penelitian diantaranya yaitu indeks persepsi korupsi sebagai indikator variabel korupsi, tingkat pengangguran terbuka dan penduduk usia 15-64 tahun sebagai indikator bonus demografi dan data pdb sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling* dengan *Purposive Sampling* dengan kriteria yang dipakai di antaranya adalah persentase pertumbuhan ekonomi, korupsi, tingkat pengangguran terbuka dan bonus demografi yang disajikan dalam bentuk data *time series* dengan jumlah sampel penelitian yaitu $n = 20$ atau terdiri dari 20 tahun mulai dari 2004-2023. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder di peroleh dari beberapa sumber yaitu situs web *Transparancy*

Internasional (TI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan metode analisis *Vector Error Correction Model* (VECM) dengan analisis yang digunakan yakni uji stasioner, uji lag optimal, uji stabilitas VAR, uji kausal granger, uji kointegritas, uji estimasi VECM, IRF dan VD

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stationeritas

Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji unit root ADF, hasil pengujian tertera pada tabel 2 menunjukkan bahwa posisi data pada tingkat level menunjukkan belum stasioner. Menurut Kuncoro (2013) jika variabel tidak lulus pada tingkat level, maka solusinya adalah melakukan diferensiasi pada tingkat selanjutnya yaitu pada tingkat *frist difference*, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji ADF Menggunakan Tingkat Second Difference

Variabel	ADF t-statistik	Prob.	Keterangan
PE	-5.506927	0.0005	Stat.
KRP	-5.094913	0.0011	Stat.
TPT	-4.835744	0.0027	Stat.
BD	-4.243534	0.0000	Stat.

Sumber : Olah Data E-Views (2010)

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel pada penelitian ini sudah stasioner pada tingkat *second difference*. Hal ini ditunjukkan dengan melihat probabilitas pada pengujian. Data disebut stasioner apabila nilai probabilitas <5%

Uji Lag Optimal

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan pada posisi lag berapakah model dapat optimal. Hasil menunjukan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Penentuan Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-235.5717	NA	4273849.	26.61908	26.81694	26.64636
1	-170.6038	93.84252	19666.01	21.17820	22.16750	21.31461
2	-142.4042	28.19961*	7084.232*	19.82269*	21.60343*	20.06823*

Sumber : Output e-views 2010 (Olah data 2024)

Tabel 3 menunjukkan bahwa panjang lag optimal terletak pada lag 2 yaitu dengan banyaknya tanda bintang (*). Selain itu nilai terkecil HQ ada pada lag 2.

Uji Stabilitas VAR

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan IRF dan ADV dalam estimasi stabil. Hasil uji stabilitas diketahui dari nilai modulus, dimana semua nilai modulusnya lebih kecil dari satu, sehingga hasil IRV dan VDC adalah valid

Tabel 4. Hasil Uji Stabilitas VAR

Root	Modulus
0.967121	0.967121
0.769392 - 0.371608i	0.854434
0.769392 + 0.371608i	0.854434
-0.049131 - 0.756714i	0.758307
-0.049131 + 0.756714i	0.758307
-0.402845 - 0.358983i	0.539585
-0.402845 + 0.358983i	0.539585
-0.274060	0.274060

Sumber : Output *e-views* 2010 (Olah data 2024)

Uji Kausalitas Granger

Dalam penelitian ini, uji kausalitas lebih ditunjukkan pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu korupsi, tingkat pengangguran terbuka dan bonus demografi. Berikut hasil uji kausalitas granger yang dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5. Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
KRP does not Granger Cause PE	18	6.54984	0.0108
PE does not Granger Cause KRP		3.88382	0.0476
TPT does not Granger Cause PE	18	4.01878	0.0438
PE does not Granger Cause TPT		0.20024	0.8210
BD does not Granger Cause PE	18	5.92594	0.0148
PE does not Granger Cause BD		0.16184	0.8523
TPT does not Granger Cause KRP	18	10.7995	0.0017
KRP does not Granger Cause TPT		0.08493	0.9191
BD does not Granger Cause KRP	18	0.19664	0.8239
KRP does not Granger Cause BD		0.84840	0.4505
BD does not Granger Cause TPT	18	0.37933	0.6916
TPT does not Granger Cause BD		0.15213	0.8604

Sumber : Output *e-views* 2010 (Olah data 2024)

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki hubungan kausalitas granger yaitu variabel dengan nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Berikut penjelasannya:

- Variabel KRP secara signifikan mempengaruhi variabel PE dengan nilai probabilitas $0.0108 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan variabel PE secara signifikan mempengaruhi variabel KRP dengan nilai probabilitas $0.0476 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara variabel KRP dan PE
- Variabel TPT secara signifikan mempengaruhi variabel PE dengan nilai probabilitas $0.0438 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, sedangkan variabel PE secara signifikan tidak mempengaruhi variabel TPT dengan nilai probabilitas $0.8210 > 0.05$ sehingga H_0 diterima

- dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas searah antara variabel TPT dan PE
- Variabel BD secara signifikan mempengaruhi variabel PE dengan nilai probabilitas $0.0149 < 0.05$ sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, sedangkan variabel PE secara signifikan tidak mempengaruhi variabel K dengan nilai probabilitas $0.8523 > 0.05$ sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas searah antara variabel BD dan PE
 - Variabel TPT secara signifikan mempengaruhi variabel KRP dengan nilai probabilitas $0.0017 < 0.05$ sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, sedangkan variabel KRP secara signifikan mempengaruhi variabel TPT dengan nilai probabilitas $0.9191 > 0.05$ sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas searah antara variabel TPT dan KRP
 - Variabel BD secara signifikan tidak mempengaruhi variabel KRP dengan nilai probabilitas $0.8239 > 0.05$ sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, sedangkan variabel KRP secara signifikan tidak mempengaruhi variabel BD dengan nilai probabilitas $0.4505 > 0.05$ sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas searah antara variabel KRP dan BD
 - Variabel BD secara signifikan tidak mempengaruhi variabel TPT dengan nilai probabilitas $0.6916 > 0.05$ sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, sedangkan variabel TPT secara signifikan tidak mempengaruhi variabel BD dengan nilai probabilitas $0.8604 > 0.05$ sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas searah antara variabel TPT dan BD

Uji Kointegritas

Uji kointegritas dilakukan untuk melihat adanya keseimbangan jangka panjang berupa pergerakan yang sama serta hubungan antar variabel yang stabil. Pada penelitian ini menggunakan metode *Johansen's Cointegration Test*, dengan *Critical Value* 0.05 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6. Hasil Uji Kointegritas (*Johansen's Cointegration Test*)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.929932	80.63603	47.85613	0.0000
At most 1 *	0.685104	32.78683	29.79707	0.0220
At most 2	0.435483	11.98762	15.49471	0.1575
At most 3	0.089894	1.695504	3.841466	0.1929

Sumber : Output *e-views* 2010 (Olah data 2024)

Dari tabel 6 dapat diketahui terdapat kointegrasi antar variabel. Hal ini di lihat dari nilai probabilitas di bawah 0,05 , maka hasil analisis VECM dapat dilanjutkan.

Uji Estimasi *Vector Error Correction Model* (VECM)

Uji estimasi VECM dilakukan karena adanya kointegritas pada saat uji kointegritas dilakukan untuk melihat analisis jangka panjang dan jangka pendek. Adapun hasil dari uji estimasi VECM, yaitu:

Tabel 7. Hasil Uji Estimasi Jangka Pendek

Variabel	T statistik	koefisien	T tabel
D(KRP(-1))	-1.17614	-1.157617	2.119905
D(TPT(-1))	-1.41602	-0.803533	2.119905
D(BD(-1))	-0.88773	-0.000118	2.119905

Sumber : Output *e-views* 2010 (Olah data 2024)

Hasil estimasi VECM jangka pendek pada tabel 7 menunjukkan variabel korupsi (KRP), bonus demografi (BD) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada *lag* 1 memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dikarenakan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel sebesar 2.119905. diduga dalam jangka pendek aktivitas ekonomi masih bisa berlangsung meskipun terdapat praktik korupsi di dalam negara tersebut.(Irawan, 2023) Selain itu, meskipun korupsi mengarah pada pemborosan sumber daya dan mengurangi efisiensi, beberapa proyek atau kebijakan yang dijalankan tetap dapat memberikan hasil positif dan dalam jangka pendek tingkat pengangguran terbuka tidak berdampak secara signifikan dikarenakan beberapa sektor ekonomi seperti informal atau ekspor tidak terlalu di pengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka. Selain itu bonus demografi juga dalam jangka pendek tidak berdampak secara signifikan apabila negara belum siap untuk memanfaatkan potensi tenaga kerja secara efektif. Terdapat beberapa faktor yang ditekankan untuk pemanfaatan bonus demografi seperti kualitas pendidikan, infrastruktur, kebijakan ekonomi yang mendukung pemanfaatan bonus demografi.

Tabel 8. Hasil Uji Estimasi Jangka Panjang

Variabel	T statistik	koefisien	T tabel
KRP (-1)	-3.65972	-1.653841	2.119905
TPT (-1)	-4.07706	-0.432840	2.119905
BD (-1)	3.35863	3.36E-05	2.119905

Sumber : Output *e-views* 2010 (Olah data 2024)

Berdasarkan tabel 8 pada jangka panjang variabel korupsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel bonus demografi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel.

Variabel korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1.653841. Artinya, jika korupsi naik sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1.653841%. Hasil analisis ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Darwin Damanik (2023) yang menyatakan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa dampak dari korupsi secara langsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan praktik korupsi merusak efisiensi sumber daya. Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur, justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, ketersediaan layanan public terbatas, menghambat peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu praktik korupsi mengurangi investasi, negara yang tingkat korupsinya tinggi menciptakan ketidakpastian yang besar di kalangan investor. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas menjadi terhambat.

Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.432840. Artinya jika terjadi kenaikan pada tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0.432840%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lidyawati (2020) dan

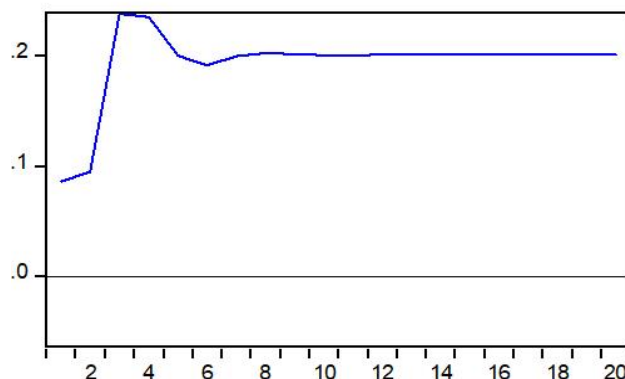
Kusumawati Kusumawati (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pengangguran akan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya permintaan barang dan jasa berkurang. Dengan demikian investor tidak tertarik melaksanakan pembangunan industri yang akhirnya menyebabkan investasi menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin turun.

Variabel bonus demografi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 3.36. Artinya jika terjadi kenaikan pada bonus demografi sebesar 1% maka menyebabkan kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 3,36%. Bonus demografi merupakan kondisi penduduk usia produktif lebih besar. Dengan peningkatan angkatan kerja, pertumbuhan pasar dan peningkatan tabungan serta investasi, negara dapat mengalami peningkatan produktivitas dan diversifikasi ekonomi. Namun, potensi ini bergantung pada berbagai faktor penunjang seperti kebijakan pemerintah, ketersediaan lapangan kerja, serta kualitas sumber daya manusia. Meskipun berpotensi untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja, jika tidak disertai dengan peningkatan dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan infrastruktur, maka bonus demografi tidak akan langsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Lapangan pekerjaan yang masih terbatas memicu timbulnya masalah pengangguran sehingga menyebabkan banyaknya penduduk usia produktif tidak bekerja dan berubah menjadi beban negara yang merugikan dan menghambat potensi pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Saumana (2020) yang menyatakan bahwa bonus demografi berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini disebabkan tingginya jumlah penduduk usia produktif akan meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

Impulse Response Function (IRF)

Analisis IRF akan menjelaskan dampak dari guncangan (*shock*) tidak hanya dalam jangka pendek tetapi dapat menganalisis dalam jangka panjang. Gambar *impulse response* akan menunjukkan respon suatu variabel akibat kejutan variabel lainnya sampai dengan beberapa periode setelah terjadi *shock*. Jika gambar *impulse response* menunjukkan pergerakan yang semakin mendekati titik keseimbangan (*convergence*) atau kembali ke keseimbangan sebelumnya bermakna respon suatu variabel akibat suatu kejutan makin lama akan menghilang sehingga kejutan tersebut tidak meninggalkan pengaruh permanen terhadap variabel tersebut. (Gujarati, 2013)

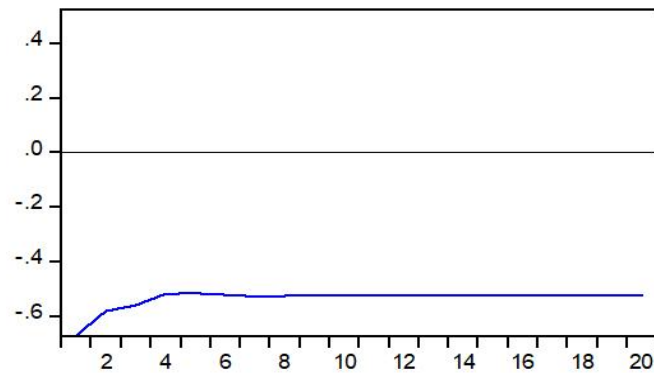
Respons of KRP to PE



Sumber : Output *e-views* 2010 (Olah data 2024)

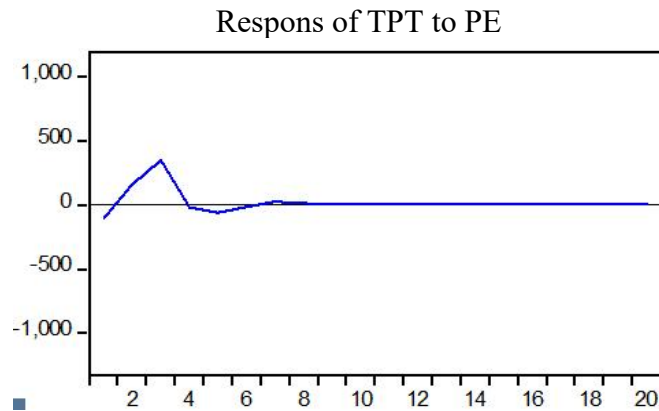
Gambar 1. Hasil Analisis IRF KRP terhadap shock PE

Respons of TPT to PE



Sumber : Output *e-views* 2010 (Olah data 2024)

Gambar 2. Hasil Analisis IRF KRP terhadap shock PE



Sumber : Output *e-views* 2010 (Olah data 2024)

Gambar 3. Hasil Analisis IRF BD terhadap shock PE

Variance decomposition (VD)

Analisis *Variance Decomposition* (VD) berguna untuk memprediksi kontribusi persentase varian setiap variabel karena adanya perubahan variabel tertentu pada periode 1 sampai 20

Tabel 9. Hasil Uji *Variance Decomposition of PE*

Variance Decomposit ion of PE:					
Period	S.E.	PE	KRP	TPT	BD
1	0.949262	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000
2	1.081961	94.83367	2.057556	0.562046	2.546731
3	1.115949	89.40694	5.026856	3.162425	2.403779
4	1.151721	84.25442	6.128136	7.245607	2.371837
5	1.182176	81.17964	6.684124	9.670457	2.465782
6	1.206618	79.28221	6.875060	11.17165	2.671078
7	1.229565	77.15752	7.304519	12.75325	2.784708
8	1.251803	75.00564	7.720710	14.38594	2.887714
9	1.274395	73.00803	8.105425	15.90592	2.980626
10	1.296424	71.20830	8.433171	17.28195	3.076580
11	1.318069	69.52652	8.747050	18.56221	3.164218
12	1.339298	67.94132	9.043262	19.76926	3.246156
13	1.360237	66.44880	9.323231	20.90562	3.322353
14	1.380856	65.04708	9.584959	21.97346	3.394499

15	1.401175	63.72697	9.831628	22.97893	3.462465
16	1.421198	62.48062	10.06449	23.92822	3.526661
17	1.440945	61.30179	10.28486	24.82605	3.587303
18	1.460424	60.18544	10.49350	25.67631	3.644748
19	1.479647	59.12678	10.69136	26.48264	3.699225
20	1.498624	58.12142	10.87925	27.24836	3.750966

Sumber : Output *e-views* 2010 (Olah data 2024)

Hasil dari pengujian *Variance Decomposition* variabel PE pada tabel 9 tersebut dapat menjelaskan pengaruh variabel korupsi, tingkat pengangguran terbuka dan bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada periode pertama variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabelnya sendiri. Namun seiring bertambah periode variabel-variabel lain mulai mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi.

Variabel korupsi memberikan pengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, dimana pengaruh cenderung mengalami kenaikan. Pada awal periode sebesar 2.057556, kemudian mengalami peningkatan hingga periode akhir periode sebesar 10.87925 persen.

Variabel tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh paling kecil pada awal periode terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pengaruh cenderung meningkat. Pada awal periode sebesar 0.562046 persen, kemudian mengalami peningkatan hingga akhir periode sebesar 27.24836 persen.

Variabel bonus demografi memberikan pengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, dimana pengaruh mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Pada awal periode sebesar 2.546731 persen, kemudian mengalami penurunan hingga periode ke-4 sebesar 2.371837, kemudian meningkat hingga akhir periode sebesar 3.750966 persen.

KESIMPULAN

Berdasarkan uji kausalitas ditemukan bahwa korupsi dan pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan kausalitas, begitu juga tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi juga terdapat hubungan kausalitas, namun tidak sebaliknya. Selain itu bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kausalitas, namun tidak sebaliknya. Hasil uji kausalitas juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka terdapat hubungan kausalitas dengan korupsi, namun tidak sebaliknya. Sedangkan bonus demografi tidak terdapat hubungan timbal balik dengan korupsi. Bonus demografi dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada hubungan kausalitas antas keduanya. Hasil estimasi model VECM secara umum menunjukkan adanya pengaruh jangka panjang variabel korupsi, tingkat pengangguran terbuka dan bonus demografi. Hasil lain menunjukkan korupsi, tingkat pengangguran terbuka dan bonus demografi memiliki pengaruh dalam jangka pendek.

SARAN

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Indonesia, penting bagi pemerintah untuk fokus pada beberapa hal. Pertama, penguatan penegakan hukum untuk mengurangi korupsi sangat penting agar anggaran negara digunakan dengan lebih efisien dan investasi bisa tumbuh. Kedua, untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui pengembangan sektor industri, infrastruktur, dan program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Ketiga, bonus demografi yang sedang terjadi harus dimanfaatkan dengan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan peluang kerja yang berkualitas untuk generasi muda. Bagi peneliti selanjutnya,

disarankan untuk menguji variabel-variabel lainnya yang belum ter jelaskan pada penelitian ini karena penelitian ini hanya menggunakan variabel Korupsi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Bonus Demografi yang memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

DAFTAR REFRENSI

- Agus Yulistiyono, E. G. (2021). *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*. Insania.
- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Helicon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.helicon.2019.e02649>
- Ardiansyah, I. (2019). *DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI*. HAWA dan AHWA.
- Arifin, M. Z. (2024). *TINDAK PIDANA KORUPSI Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. Publica Indonesia Umum.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Bonus Demografi dan Harapan Kedepannya*.
- Bastianeli, E. (2024). The changing educational and social class gradients in union dissolution: Evidence from a latecomer of the Second Demographic Transition. *Research in Social Stratification and Mobility*, 92.
- Darwin Damanik, & Saragih, M. (2023). Korupsi, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 71–81. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.494>
- Gujarati. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Selemba Empat.
- Hazmi, R. A. Al. (2024). Pengaruh Kemiskinan Dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 1–10.
- Huda, I. U., Karsudjono, A. J., & Darmawan, R. (2021). Analisis Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Al-KALAM JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v8i2.5294>
- Imanto, R., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 11(2), 59. <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.115>
- Irawan, R. (2023). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012 – 2022. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(2), 219–228. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.17019>
- Kuncoro, M. (2013). *MUDAH MEMAHAMI DAN MENGANALISIS INDIKATOR EKONOMI*. UPP STIM YKPN.
- Kurniawati, E., & Sugiyanto, C. (2021). Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 41–58. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.04>
- Kusumawati, A., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 118. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.253>
- Lestari, A. (2024). *ENGARUH BONUS DEMOGRAFI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN*. 06(1), 25–34.
- Lidyawati, & Murtala, M. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i1.3167>
- Long, Y., Yoshida, Y., Huang, L., Chen, P., Wu, Y., & Gasparatos, A. (2024). Demographic

- transitions hinder climate change mitigation for Japan's shrinking and aging households. *Cell Reports Sustainability*, 1(3), 100053. <https://doi.org/10.1016/j.crsus.2024.100053>
- Luna-Pla, I., & Nicolás-Carlock, J. R. (2020). Corruption and complexity: a scientific framework for the analysis of corruption networks. *Applied Network Science*, 5(1). <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00258-2>
- Malik, A. A. (2022). *ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGAGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA*. Universitas Bakrie Press.
- Rahmalia, S. (2019). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGANGGURAN , DAN KEMISKIAN TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 1. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Saumana, N., Rotinsulu, D. C., & Rotinsulu, T. O. (2020). Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(4), 95–109. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32840>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index*.
- Triatmanto, B. (2023). *The interplay of corruption, human capital, and unemployment in Indonesia: Implications for economic development*. 3.
- Wardani, N. A. (2024). Analisis Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 8(02), 144–151. <https://doi.org/10.22219/jie.v8i02.31749>
- Winarni, E. (2022). *EKONOMI MAKRO* (A. Pustaka (ed.)).
- Yossinomita. (2024). *PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERPAJAKAN*. CV Hanura Utama.